

BENTENG KOLONIAL EROPA DI PULAU MAKIAN DAN PULAU MOTI: Kajian Atas Pola Sebaran Benteng di Wilayah Maluku Utara
*European Colonial Fortress on the Makian Island and Moti Island:
Study on Pattern of Distribution Fortress in North Maluku Territory*

Syahrudin Mansyur

Balai Arkeologi Ambon-Indonesia
Jl. Namalatu-Latuhalat, Ambon 97118
hitam_putih07@yahoo.com

Naskah diterima: 09-03-2015; direvisi: 19-08-2015; disetujui: 28-09-2015

Abstract

In the early period of the spice trade, Makian Island Moti Island are the main source in the production of cloves. This condition is the main factor that attracted the presence of Europeans that its influences still can be traced recently. Evidence of the presence of European nations can be seen from the distribution of the fort in the island Makian and Moti Island. This research is intended to uncover the factors that underlie the formation of a network of fortifications in the two islands. Using the method of interpretation of the distribution pattern of the castle and the relationship between regions, this paper uncovered that the main factors the formation of a network of fortifications in the region is the natural conditions or geographical factors, so that consideration of the establishment of each fort associated with the monitoring of safety conditions, supervision of the marketing of cloves, as well as efforts to maintain the existence of a colonial power in the region.

Keywords: *the spice trade, colonial, the pattern distribution of the fort*

Abstrak

Pada periode awal perdagangan rempah-rempah, Pulau Makian dan Pulau Moti adalah sumber utama produksi cengkih. Hal inilah kemudian menjadi daya tarik kehadiran bangsa Eropa yang hingga saat ini masih dapat disaksikan jejak pengaruhnya. Bukti-bukti kehadiran bangsa Eropa tersebut dapat dilihat dari sebaran benteng yang ada di Pulau Makian dan Pulau Moti. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap faktor-faktor yang melatari terbentuknya jaringan perbentengan yang ada di kedua pulau tersebut. Melalui metode penafsiran terhadap pola sebaran benteng dan hubungan antar wilayah, tulisan ini berhasil mengungkap bahwa faktor utama terbentuknya jaringan perbentengan di wilayah ini adalah kondisi alam atau faktor geografis, sehingga pertimbangan atas pendirian setiap benteng berkaitan dengan pengawasan terhadap kondisi keamanan, pengawasan terhadap tata niaga cengkih, serta upaya untuk mempertahankan eksistensi kekuasaan kolonial di wilayah ini.

Kata Kunci: perdagangan rempah-rempah, kolonial, pola sebaran benteng

PENDAHULUAN

Kehadiran bangsa Eropa di wilayah Maluku Utara tidak lepas dari peran wilayah ini sebagai satu-satunya sumber produksi cengkih yang menjadi komoditi utama perdagangan masa lalu. Dalam berbagai sumber disebutkan bahwa tanaman cengkih merupakan tanaman endemik yang awalnya

hanya ditemukan di lima pulau di Maluku Utara, yaitu Pulau Ternate, Pulau Tidore, Pulau Moti, Pulau Makian, dan Pulau Bacan (Tibbets, 1979: 14-15; Lape, 2000: 15; Andaya, 1993: 1 dan Mansyur, 2014: 87). Kelima pulau ini merupakan gugusan kepulauan yang membentang dari utara ke arah selatan dan secara geografis terletak

di sebelah barat Pulau Halmahera yang merupakan pulau terbesar di wilayah Maluku Utara. Kondisi geologis kelima pulau ini merupakan pulau gunungapi dengan kontur yang rapat serta memiliki lereng-lereng pegunungan sehingga tanaman cengkih dapat tumbuh subur di pulau-pulau tersebut. Pulau Makian pada periode awal perdagangan cengkih bahkan dikenal sebagai sumber produksi dengan jenis cengkih terbaik yaitu Cengkih Raja (Amal, 2010a: 98; Amal 2010b: 35).

Dalam konteks jaringan perdagangan, Tanudirdjo (2013), mengemukakan bahwa terdapat tiga (3) hal yang menjadi sumber keberhasilan Kepulauan Maluku menempati posisi penting dalam perdagangan internasional, yaitu: *pertama*, kemampuannya yang konsisten menghasilkan produk atau komoditas yang khas, sehingga selalu dibutuhkan; *kedua*, kemampuan mengatasi keterbatasan dengan melakukan konsolidasi ke dalam melalui jejaring regional untuk bekerjasama memenuhi kebutuhan; dan *ketiga*, kemampuannya untuk mempertahankan jejaring hubungan dengan dunia di luarnya (Tanudirdjo, 2013: 5). Kemunculan Ternate sebagai bandar utama perdagangan cengkih diawali oleh Sida Arif Malamo yang memerintah pada tahun 1317-1331. Sejak saat itu, mulai berdatangan pedagang-pedagang Arab, Cina, dan pedagang-pedagang nusantara dari Jawa, Malaka, dan Makassar. Para pedagang ini kemudian menetap dan membuka pos-pos niaga di Ternate, Tidore, dan Makian (Amal, 2010b: 35-36).

Munculnya Ternate sebagai pusat niaga cengkih tidak hanya mengundang para pedagang-pedagang Asia, namun juga para pedagang Eropa khususnya Portugis dan Spanyol sekitar awal abad ke-16, kemudian diikuti oleh Belanda sejak akhir abad ke-16. Sejak saat itu pula, bangsa Eropa membuka pos-pos perdagangan dan kemudian menetap pula di wilayah ini. Diawali dengan pembangunan pos-pos perdagangan, para

pedagang Eropa ini kemudian mendirikan benteng yang tidak hanya berfungsi sebagai bangunan pertahanan tetapi sekaligus sebagai pusat perdagangan, pemerintahan bahkan permukiman. Benteng-benteng yang dibangun oleh bangsa Eropa bahkan identik dengan dominasi kekuasaan, eksploitasi ekonomi dan simbol kekuasaan asing (Gill, 1995: 59; Marihandono, 2008: 3; Mansyur, 2011:25).

Pada awalnya, bangsa Eropa mulai membangun benteng-bentengnya di wilayah Pulau Ternate dan Tidore. Bangsa Portugis yang merupakan pendatang awal di Maluku membangun Benteng Gamlamo pada tahun 1522 di Ternate (Abdurachman, 2008: 98 dan Ricklefs, 2010: 45), demikian pula Spanyol yang membangun benteng Tahoela pada tahun 1610 di Tidore, serta Belanda yang hadir pertamakali di Kepulauan Rempah-Rempah pada tahun 1599 membangun benteng Oranje di Ternate pada tahun 1607 (Pusat Dokumentasi Arsitektur, 2010: 191, 193, dan 195). Penempatan benteng-



Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian (Pulau Moti dan Pulau Makian, bertanda lingkaran merah). (Sumber: Website Propinsi Maluku Utara)

benteng di kedua pulau tersebut oleh bangsa Eropa pada saat itu, tidak lepas dari peran kedua pulau ini sebagai pusat kekuasaan lokal sekaligus sebagai pusat perdagangan rempah-rempah di Maluku.

Seiring dengan perkembangan kebutuhannya bangsa Eropa kemudian membangun benteng-benteng di setiap wilayah atau pulau di Maluku (utara). Persebaran benteng-benteng kolonial di wilayah ini, pada akhirnya membentuk pola yang disebut jaringan perbentengan dengan berbagai pertimbangan kebutuhannya. Dalam konteks yang lebih luas kajian terhadap jaringan perbentengan adalah model penelitian yang berupaya mengembangkan perspektif sistem yang lebih luas. Oleh karena itu, dibutuhkan pendalaman aspek kronologi dan hubungan antarsitus yang menjadi dasar untuk merekonstruksi *networking* kuno (Tim Penelitian, 2006: 85).

Terbentuknya jaringan perbentengan di wilayah ini tidak lepas dari konteks jaringan perdagangan cengkih masa kolonial di Maluku. Ternate dan Tidore sebagai dua pusat kekuasaan lokal dianggap sebagai pusat perdagangan, namun bagaimana dengan wilayah-wilayah lain di sekitarnya. Selain Ternate dan Tidore, wilayah lain yang menjadi sumber utama produksi cengkih di Maluku adalah Pulau Makian dan Pulau Moti. Kajian terhadap jaringan perdagangan menjadi penting untuk mengetahui kedudukan sebuah wilayah yang merupakan pendukung untuk memenuhi kebutuhan yang kaitannya dengan sejumlah indikator komoditi dan pelabuhan (Harkatiningsih, 2014: 70). Sementara itu, dalam hubungannya dengan jaringan perbentengan, diketahui bahwa kedua pulau tersebut memiliki potensi peninggalan kolonial berupa sebaran benteng (Wall, 1928: 269-275; Pusat Dokumentasi Arkeologi, 2010: 189). Dalam kerangka inilah, tulisan ini mengkaji tentang bagaimana pola sebaran benteng-benteng kolonial dan faktor utama terbentuknya jaringan perbentengan tersebut.

Ilmu arkeologi mengenal studi arkeologi keruangan sebagai pendekatan untuk mengetahui pola sebaran situs-situs arkeologi. Data utama dalam pendekatan keruangan ini mencakup tiga hal, yaitu: keletakan, satuan ruang (skala tingkat mikro, meso, dan makro), serta hubungan-hubungan atau interaksi di antara semua unsur-unsur tersebut dalam satuan-satuan ruang yang berbeda skalanya. Dalam studi ini, peta persebaran situs arkeologi menjadi bahan utama untuk melakukan penafsiran-penafsiran, baik penafsiran atas dasar bentuk persebarannya maupun penafsiran atas faktor-faktor yang melatari bentuk persebarannya (Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional, 2008: 183).

Sementara itu Abbas (2001), dalam kajiannya tentang faktor yang melatari pemilihan lokasi pendirian sebuah benteng yang dibangun oleh Pemerintah Belanda di Pulau Jawa menyebutkan bahwa sejumlah faktor yang mempengaruhi pemilihan lokasi benteng, diantaranya:

1. Pentingnya suatu daerah pada masa pendirian benteng (misalnya potensi tempat itu untuk dijadikan pusat perdagangan, adanya suplai produksi yang dibutuhkan, dan potensi untuk digunakan sebagai pusat pemerintahan lokal).
2. Ancaman atau penolakan yang dihadapi (misalnya ancaman eksternal dari orang-orang asing atau ancaman internal dari penguasa setempat).
3. Strategi yang diterapkan dalam upayanya menaklukkan suatu wilayah tertentu untuk perluasan kekuasaan (Abbas, 2001: 3).

METODE

Ruang lingkup tulisan ini dibatasi berdasarkan aspek ruang dan waktu. Aspek pertama didasarkan pada ruang geografis, sementara aspek kedua didasarkan pada periodisasi penguasaan bangsa kolonial di wilayah ini. Ruang geografis yang dipilih dalam tulisan adalah Pulau Makian dan

Pulau Moti yang terletak di sebelah selatan Pulau Ternate dan Pulau Tidore. Jika ditilik dari aspek jaringan lokal dalam perdagangan masa lalu, kedua pulau ini dianggap sebagai wilayah penyangga produksi cengkih di wilayah Maluku. Sementara itu, pembatasan periode penguasaan bangsa Kolonial dibatasi pada masa VOC (Belanda), hal ini karena inventarisasi awal terhadap sebaran benteng yang ada di wilayah ini sebagian besar adalah benteng yang dibangun oleh Belanda.

Aspek yang dikaji dalam tulisan ini adalah aspek pola sebaran dan faktor-faktor yang mendukung terbentuknya jaringan perbentengan yang ada di wilayah Pulau Makian dan Pulau Moti. Guna menjawab kedua aspek tersebut, maka tahapan yang digunakan merujuk pada tahapan penelitian arkeologi yaitu studi kepustakaan dan metode survei atau observasi. Studi kepustakaan dimaksudkan untuk mengumpulkan data awal tentang objek penelitian, serta metode survei dimaksudkan untuk melihat kondisi perbentengan yang ada di lokasi penelitian. Sementara itu, pengolahan data dilakukan dengan pendekatan analisis deskriptif dan analisis kontekstual. Analisis pertama yaitu melihat pola sebaran dengan memperhatikan titik lokasi, bentuk/jenis, serta fungsi benteng. Selanjutnya analisis kedua yaitu melihat peran wilayah dan hubungan antar wilayah. Diawali dengan hubungan antar situs dalam konteks mikro kemudian dilanjutkan dengan hubungan antar wilayah dalam konteks meso. Tahapan akhir adalah penarikan kesimpulan untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung terbentuknya jaringan perbentengan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Sebaran Benteng Kolonial di Pulau Makian dan Pulau Moti

1. Pulau Makian

a. Benteng Mauritius

Benteng Mauritius berada di Ngofakiaha Pulau Makian. Titik astronomis benteng Mauritius adalah: N 00°22'01.8" E 127°25'11.2". Titik lokasi benteng berada

di sisi timur laut Pulau Makian. Secara geografis lokasi benteng Mauritius berada di atas perbukitan dengan ketinggian ± 50 mdpl dengan jarak ± 500 meter dari pantai. Lokasi geografis ini menempatkan posisi benteng sangat strategis karena dapat memantau perairan utara dan barat Pulau Makian. Arah utara lokasi benteng terdapat Pulau Moti, Tidore dan Ternate; sementara itu, arah timur terdapat pulau Halmahera. Kondisi iklim dan cuaca yang berpengaruh terhadap arah hembusan angin juga menjadikan lokasi benteng ini sangat strategis. Hal ini diakibatkan karena pada waktu-waktu tertentu ketika angin berhembus dari arah barat, maka perairan sebelah barat Pulau Makian sangat berbahaya bagi jalur pelayaran. Jika angin berhembus dari arah barat seperti ini, maka jalur pelayaran timur yang diapit oleh Pulau Makian dan Pulau Halmahera menjadi pilihan karena perairan yang lebih tenang.



Gambar 2. Tampak dinding timur benteng yang merupakan bagian depan atau sisi yang menghadap ke arah laut
(Sumber: Dokumen Balai Arkeologi Ambon, 2014)

Terkait sejarah benteng, terdapat perbedaan informasi tentang pembangunan benteng. Menurut data Pusat Dokumentasi Arsitektur, benteng ini dibangun oleh VOC pada tahun 1613, pada masa pemerintahan Gubernur Pieter Both. Menurut sejarahnya, benteng ini pernah menjadi lokasi pertemuan antara pihak VOC, Sangaji Makian dan Sangaji Limatau (perwakilan Ternate) yang menyepakati beberapa perjanjian. Salah satunya adalah menghargai perbedaan agama dan kebebasan menjalankan keyakinan

di antara dua pemeluk agama yang ada di Makian yaitu penduduk yang beragama Islam dan penduduk yang beragama Kristen (Pusat Dokumentasi Arsitektur, 2010: 189). Sementara itu, informasi lain menyebutkan bahwa benteng ini dibangun pada tahun 1612. Benteng dibangun pada sebuah bukit dekat perkampungan yang disebut Ngofakiaha atau Ngofakioha, pilihan lokasi ini untuk memudahkan pemantauan ke arah laut. Pada masa pemerintahan Gubernur Jacques Le Febure (1625-1629) sebuah bangunan berdiri di dekat pantai yang difungsikan sebagai tempat tinggal sekaligus sebagai gudang, bangunan ini diberi nama *Zeeburgh* (Roever dkk, 2008: 263)

Adapun kondisi benteng Mauritius relatif utuh, dimana bastion dan beberapa sisi dinding yang masih ada hingga saat ini. Bastion yang masih utuh adalah bastion barat laut dan bastion barat daya, sementara bastion timur laut dan tenggara tidak utuh lagi karena beberapa sisi dinding (baik sisi *curtien* maupun sisi *flank*) telah runtuh. Sisi dinding yang juga masih ada adalah sisi utara dan timur, sisi barat tidak tampak lagi karena tertutup oleh lapisan tanah, dan sisi selatan telah runtuh dan hanya menyisakan setengah bagian dinding. Ukuran pada bastion barat laut adalah *curtien* = 4,65 meter; dan *flank* atau *face* = 14,85 meter. Sementara itu panjang *parapet* atau dinding yang menghubungkan antar bastion (dinding utara) adalah 42 meter; serta dinding selatan adalah 39,60 meter. Dinding barat atau dinding bagian belakang tidak diketahui karena sisi dinding telah runtuh dan hanya menyisakan beberapa bagian pondasi terpisah yang muncul di permukaan tanah serta sisi dinding yang masih menempel di sudut-sudut bastion barat daya dan bastion barat laut. Meski demikian, pengukuran yang dilakukan dari kedua titik bastion tersebut diperoleh ukuran 36.02 meter. Ukuran gerbang adalah lebar = 2,60 meter, dengan ketebalan dinding pada gerbang adalah 82 cm.

b. Benteng Poewati

Catatan sejarah menyebutkan bahwa benteng ini dibangun oleh Johan Ottens pada 24 Oktober hingga 5 Desember 1634 (Pusat Dokumentasi Arsitektur, 2010: 189). Benteng Poewati yang berada di desa Sangapati terletak di ketinggian yaitu di sebuah tebing pantai. Sisa pondasi yang ada saat ini adalah berupa struktur pondasi di bagian tebing yang tampaknya dibuat sebagai tanggul atau penahan struktur tanah yang ada di bagian atas.



Gambar 3. Struktur Benteng Poewati yang berada di atas tebing
(Sumber: Dokumen Balai Arkeologi Ambon, 2014)

Jika mengamati struktur yang ada serta pengamatan terhadap lokasi sekitarnya, tampak jelas bahwa bangunan ini merupakan Redout atau benteng kecil sebagai pos pengawas. Titik lokasi benteng berada di sisi timur Pulau Makian. Lokasi benteng ini juga relatif dekat yaitu berjarak 5 kilometer arah selatan benteng Mauritius yang memiliki skala ukuran yang lebih besar. Posisi benteng Poewati juga berada pada kontur yang lebih rendah dari Benteng Mauritius sehingga memungkinkan untuk mengirim informasi berupa tanda-tanda khusus kepada petugas jaga yang ada di Benteng Mauritius.

c. Benteng Tafasoho

Benteng Tafasoho berada dalam wilayah administratif Kampung Mateketen, desa Tafasoho. Benteng ini terletak di atas perbukitan yang berjarak sekitar 500 meter dari pantai. Secara geografis, keletakan benteng berada pada sisi barat daya Pulau Makian. Posisi geografis ini memungkinkan pemantauan ke arah barat dan selatan perairan Pulau Makian, dimana terdapat gugusan Pulau Kayoa, Kasiruta, dan Pulau Bacan di sebelah selatan dan perairan yang merupakan jalur masuk ke Pulau Tidore dan Ternate yang ada di sebelah utara Pulau Makian. Keletakan astronomis benteng ini adalah: N 00°19'42.9" E 127°20'49.6". Saat ini lokasi struktur pondasi benteng berada di tengah-tengah perkebunan pala dan kelapa milik Bapak Haji Lun. Kondisi bentang lahan pada lokasi benteng merupakan perbukitan, sehingga batas alam benteng merupakan lereng curam pada di bagian selatan dan utara, sementara di sebelah barat dan timur merupakan tanah yang relatif datar.



Gambar 4. Struktur yang tersisa dari Benteng Tafasoho, lokasi benteng berada di atas bukit dengan arah pandang ke arah barat Pulau Makian (Sumber: Dokumen Balai Arkeologi Ambon, 2014)

Sisa pondasi yang ada saat ini hanya menyisakan sebuah struktur berbentuk "L" sehingga menampakkan sebuah sudut yang diduga merupakan bagian dari sebuah bastion. Jika mengamati kontur tanah sekitar lokasi ini dimana bagian barat dan utara struktur yang relatif datar kemungkinan struktur ini

merupakan bagian dari bastion barat laut benteng. Adapun luas kontur tanah yang relatif datar sekitar 100 x 100 meter. Sementara itu, di sebelah tenggara pondasi terdapat gundukan tanah dengan ketinggian $\pm 2-3$ meter yang mengarah ke selatan dengan panjang ± 30 meter. Jika mengamati perbedaan kontur tanah dan keletakannya, gundukan tanah ini diduga merupakan bekas lokasi bastion tenggara benteng. Adapun ukuran sisa struktur yang masih dapat diamati adalah struktur yang mengarah ke timur 9,6 meter; struktur yang mengarah ke utara 3,22 meter; dan tinggi sudut bastion adalah 1,30 meter dengan ketebalan struktur 1,10 meter.

Selain berupa struktur, temuan lain yang diperoleh dari survei di lokasi ini adalah dua meriam yang terletak di pintu gerbang desa atau tepat di sisi pantai pelabuhan reguler masyarakat Mateketen. Kondisi dua meriam saat ini telah rusak yaitu pada bagian mulut meriam yang telah patah, tidak diketahui penyebab rusaknya meriam tersebut. Adapun ukuran Meriam I adalah panjang 175 cm, diameter pangkal 35 cm, diameter kuping 7 cm, panjang kuping 8 cm, lubang sulut pada pangkal meriam adalah 4 mm, sementara lubang atau kaliber meriam adalah 12 cm. Ukuran pada Meriam II adalah panjang 205 cm, diameter pangkal 37 cm, diameter kuping 8 cm, panjang kuping 8 cm, lubang sulut 2 cm, dengan kaliber 10 cm. Keletakan astronomis lokasi ini adalah : N 00°19'51.2" E 127°20'41.7".

d. Benteng Wailoa (Tabulolo)

Secara administratif, benteng ini berada di desa Wailoa Kecamatan Pulau Makian, meski demikian lokasi benteng cukup jauh dari permukiman penduduk. Benteng ini berada di atas perbukitan yang berjarak sekitar 50 meter dari pantai. Titik lokasi benteng berada di sisi tenggara Pulau Makian. Adapun titik astronomis benteng berada pada : N 00°16'53.2" E 127°22'59.7".



Gambar 5. Satu-satunya titik lokasi struktur yang masih dapat diidentifikasi di lokasi benteng Tabulolo, desa Wailoa
(Sumber: Dokumen Balai Arkeologi Ambon, 2014)

Tidak diketahui secara pasti kapan benteng ini dibangun, namun berdasarkan catatan Belanda tahun 1612, sebuah benteng dibangun yang diberi nama Fort Tabelolo atau lebih dikenal dengan Fort Wailoa (Pusat Dokumentasi Arsitektur, 2010: 189). Sementara itu, informasi lain diperoleh dari dokumen Belanda yang dibuat pada tahun 1651 oleh Johannes Nessel yang memuat sebuah gambar atau bentuk benteng Tabilolo. Dalam dokumen ini tampak jelas bentuk benteng Tabilolo merupakan jenis Redoubt atau bangunan berbentuk segi empat yang dilengkapi dengan embrasure atau ceruk meriam pada setiap sisi dinding bagian atas (Roever dkk, 2008: 263). Jenis benteng ini juga sering ditingkatkan penggunaannya karena sering pula difungsikan sebagai gudang komoditi atau Blokhuis.

2. Pulau Moti

a. Benteng Nassau

Benteng Nassau berada di wilayah administratif RT 02, Kelurahan Kota, Kecamatan Ternate Pulau, Kota Ternate.



Gambar 6. Kondisi reruntuhan benteng Nassau di Pulau Moti
(Sumber: Dokumen Balai Arkeologi Ambon, 2014)

Lokasi benteng berada di daerah pesisir, dengan temuan atau indikasi struktur ditemukan di daerah pantai serta berada di lingkungan permukiman penduduk. Secara geografis, lokasi benteng berada di sebuah tanjung di sisi timur laut Pulau Moti. Adapun titik astronomis benteng berada pada N 00°28'44.5" E 127°25'07.1".

Benteng Nassau dibangun oleh Belanda pada tahun 1609 atas permintaan dari masyarakat Ternate ketika itu untuk mengamankan daerah ini. Pada tahun 1625, benteng ini ditinggalkan oleh Belanda (Wall, 1928: 269; Pusat Dokumentasi Arsitektur, 2010: 192). Benteng yang ada di Pulau Moti saat ini hanya berupa puing yang berada di pantai dan lingkungan permukiman penduduk. Lokasi benteng yang berada di sebuah tanjung di sisi timur laut Pulau Moti sehingga tampak jelas dapat memantau arah utara dan timur Pulau Makian.

Kondisi benteng saat ini hanya berupa puing pondasi yang tersebar dari arah pantai hingga permukiman masyarakat. Terdapat dua titik lokasi sisa struktur yang berada di pantai, serta beberapa titik bekas pondasi yang berada di tengah-tengah permukiman warga Kelurahan Kota. Berdasarkan pengamatan, sisa struktur pada salah satu titik yang ada di pantai merupakan bagian embrasure atau ceruk meriam yang memiliki ukuran 80 x 100 cm, ketebalan struktur adalah 130 cm. Ukuran bongkahan struktur lepas ini berukuran 4,50 x 1,90 meter, adapun material penyusun struktur adalah batu karang dengan spesi kapur. Titik lokasi struktur lepas kedua memiliki ukuran 4,50 x 5 meter dengan ketebalan struktur 75 cm. Sementara itu, titik lokasi struktur pondasi yang ada di lingkungan permukiman penduduk berada di sebelah selatan dengan jarak ± 100 meter dari pantai. Informasi penduduk menyebut bahwa di lokasi ini pernah ada dua meriam yang saat itu diangkut oleh pihak militer dan dibawa ke Kota Ternate.

b. Struktur Bekas Redout (?) dan Makam Kuno (Jere) di Pulau Moti

Selain titik lokasi benteng yang berada di daerah pesisir, terdapat juga titik lokasi yang diduga merupakan bekas lokasi benteng yang berada di atas perbukitan. Indikasi keberadaan bangunan benteng di lokasi ini yaitu adanya tumpukan batuan baik batu gunung maupun batu karang, dimana pada bagian material tersebut masih menempel spesi campuran kapur bakar dan pasir. Lokasi memiliki kontur yang lebih tinggi ± 1 meter dari areal sekitarnya dengan luas berukuran 12,60 x 10 meter.

Secara umum, indikasi keberadaan bangunan di lokasi ketinggian sering disebut dengan Redout atau benteng kecil yang berfungsi sebagai pos pengawas untuk memantau keadaan sekitarnya. Dari lokasi ini sendiri dapat memantau arah laut serta Pulau Mare, Tidore, Maitara, dan Ternate yang berada di arah utara serta pesisir barat Pulau Halmahera yang ada di arah timur Pulau Moti.

Selain itu, di sisi timur laut terdapat tiga makam atau oleh masyarakat setempat disebut dengan Jere. Ketiga makam ini saling berdekatan dengan areal seluas 2,5 x 2,10 meter. Ketiga makam masing-masing memiliki dua batu nisan berbentuk pipih, sehingga berjumlah enam batu nisan. Titik lokasi nisan berada pada : 00°28'41.8" LU dan 127°24'52.3" BT.



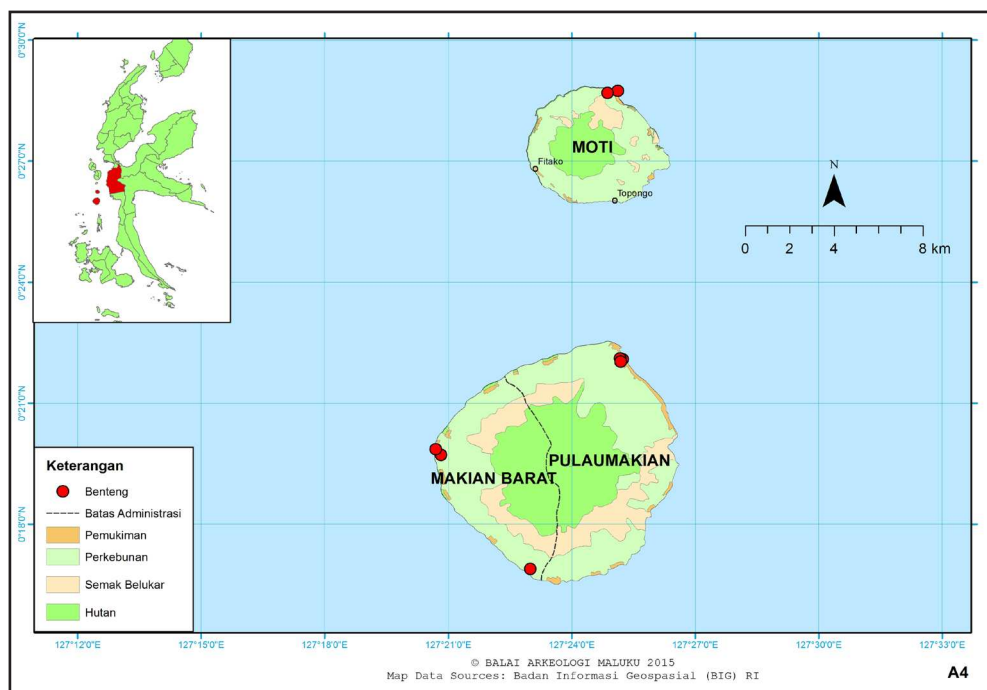
Gambar 7. Reruntuhan struktur (lepas) yang berada di lokasi Redout (?) di atas perbukitan
Kampung Kota Pulau Moti
(Sumber: Dokumen Balai Arkeologi Ambon, 2014)

Pola Sebaran Benteng

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, diketahui bahwa sebagian besar kondisi benteng yang ada di lokasi penelitian saat ini hanya menyisakan puing-puing berupa sisa struktur baik pondasi maupun dinding benteng. Benteng dengan kondisi relatif utuh hanya benteng Mauritius yang ada di Desa Ngofakiaha, sementara benteng yang lain yaitu Benteng Tafasoho, Puwati, Wailoa, dan Nassau, hanya tinggal puing-puing struktur. Oleh karena itu, dilakukan upaya penelusuran sumber historis berupa dokumentasi kuno yang memuat tentang sejarah kehadiran VOC di Maluku. Dengan demikian, analisis bentuk benteng dilakukan dengan mengkomparasikan hasil observasi di lapangan dan penelusuran sumber-sumber historis.

Secara umum, fungsi sebuah benteng dapat diketahui berdasarkan jenis atau bentuk serta skala atau luas bangunan benteng. Jenis redout umumnya memiliki ukuran dan luas bangunan yang kecil, dan jenis *blokhuis* memiliki ukuran yang lebih besar dibanding redout. Selain perbedaan ukuran bangunan, kedua jenis benteng ini juga berbeda dalam hal fungsi bangunan, *redout* lebih berfungsi sebagai pos pengawas, dan *blokhuis* biasanya ditambahkan dengan fungsi sebagai gudang komoditi. Sementara jenis *klein fort* umumnya memiliki ukuran yang lebih besar namun lebih kecil dibanding jenis *Groote Forten* atau kastil.

Sebaran benteng yang ada di lokasi penelitian dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis yaitu *Redout*, *Blokhuis*, dan *Klein Fort*. Kelompok *Redout* yaitu benteng Puwati dan benteng Wailoa; sementara itu, benteng yang dikelompokkan sebagai jenis *Klein Fort* adalah benteng Nassau, Benteng Tafasoho dan Benteng Mauritius. Khusus untuk benteng Nassau, jika informasi bahwa terdapat struktur lain di lokasi yang tidak jauh dari benteng tersebut, maka diduga bahwa benteng ini dilengkapi dengan *Redout* sebagai pos pengawas. Demikian halnya, benteng Wailoa yang menyebut informasi keberadaan



Gambar 8. Peta Sebaran Benteng di Pulau Makian dan Pulau Moti
(Sumber: Dokumen Balai Arkeologi Ambon, 2015)

struktur lain di lokasi sekitarnya, sehingga dapat disebutkan bahwa terdapat dua jenis bangunan pertahanan yang ada di lokasi ini yaitu jenis *Redout* dan *Blokhuis*.

Sementara itu, titik-titik lokasi keberadaan benteng dapat dilihat berdasarkan keletakan geografisnya, yaitu satu benteng di Pulau Moti, dan empat benteng di Pulau Makian. Benteng Nassau yang berada di Pulau Moti terletak di sisi timur laut Pulau Moti, benteng ini terletak di daerah pesisir dan diduga dilengkapi dengan satu pos pengintai yang terletak di bagian perbukitan. Sementara itu, Benteng Tafasoho berada sisi barat daya Pulau Makian, benteng ini terletak di ketinggian. Benteng Mauritius juga terletak di ketinggian dan berada di sisi timur laut Pulau Makian. Benteng Puwati terletak di atas sebuah tanjung di sisi timur Pulau Makian. Terakhir adalah benteng Wailoa yang berada di sisi tenggara Pulau Makian, di lokasi ini terdapat dua bangunan pertahanan yang masing-masing terletak di atas perbukitan.

Jika mengamati posisi geografis masing-masing benteng tampak jelas bahwa jaringan perbentengan dibangun untuk mengawasi perairan sekitarnya. Demikian halnya, keletakan

benteng yang berada di atas ketinggian. Satu-satunya benteng yang berada di pesisir adalah benteng Nassau di Pulau Moti yang juga dilengkapi sebuah *redout* di bagian perbukitan yang tidak jauh dari lokasi benteng. Posisi geografis, benteng Nassau yang berada di sisi timur laut dapat mengamati perairan di sebelah utara dan timur Pulau Makian. Benteng Tafasoho yang berada di sisi barat daya Pulau Makian dapat mengamati perairan di sebelah barat dan selatan Pulau Makian.

Selain fungsi pertahanan dan pengamatan terhadap perairan sekitarnya, fungsi benteng-benteng yang ada di Pulau Moti dan Makian dapat diketahui berdasarkan bentuk dan skala bangunannya. Benteng dengan bentuk dan skala bangunan yang besar yang dikelompokkan ke dalam jenis Klein Fort adalah Benteng Nassau di Pulau Moti, serta Benteng Mauritius dan Benteng Tafasoho di Pulau Makian. Pendirian bangunan pertahanan dengan jenis Klein Fort seperti ini tentu mempertimbangkan komunitas permukiman di sekitarnya. Dengan demikian, jelas bahwa masyarakat Moti, Ngofakiaha dan Tafasoho merupakan permukiman yang cukup besar saat itu.

Tabel 1. Sebaran Benteng di Wilayah Penelitian

No	Nama Benteng	Lokasi	Kondisi Benteng	Jenis
1	Benteng Ngofakiaha	Kampung Ngofakiaha Pulau Makian	Relatif utuh	Klein Fort
2	Benteng Puwati	Kampung Puwati Pulau Makian	Tinggal Puing	Redout
3	Benteng Wailoa	Kampung Wailoa Pulau Makian	Tinggal Puing	Redout
4	Benteng Tafasoho	Kampung Mateketen Pulau Makian	Tinggal Puing	Klein Fort
5	Benteng Nassau/Moti	Kampung Kota Pulau Moti	Tinggal Puing	Klein Fort
6	Redout Moti	Kampung Kota Pulau Moti	Struktur Lepas	Redout

Sumber: Hasil Penelitian 2014

Peran Wilayah dan Hubungan Antar Wilayah

Pembahasan tentang peran wilayah dan hubungan antar wilayah dimaksudkan untuk memperoleh gambaran sinkronik dan diakronik wilayah penelitian. Interpretasi terhadap sumber historis dan kompleksitas temuan menjadi data penting untuk memberikan gambaran sinkronik. Kompleksitas temuan (tinggalan arkeologi) menjadi aspek perhatian utama dalam membahas peran wilayah, bahwa wilayah yang memiliki kompleksitas yang tinggi adalah wilayah pusat sedang wilayah yang memiliki kompleksitas yang rendah hanya merupakan wilayah penunjang, pengawasan, atau pendukung aktivitas di pusat kekuasaan atau pusat pemerintahan (Harkatiningsih, 2014: 78). Dengan demikian, berdasarkan sejumlah data yang ada, pembahasan peran wilayah dan hubungan antar wilayah diawali dengan peran wilayah pada periode kolonial yaitu kehadiran Portugis-Spanyol, serta Belanda di Maluku Utara.

Sebelum kehadiran bangsa Eropa di Maluku Utara, Pulau Makian merupakan wilayah persaingan dua kekuatan lokal antara Ternate di satu pihak dan Tidore di pihak lain. Terkait dengan persaingan ini, wilayah Pulau Makian bahkan terbagi atas dua wilayah kekuasaan (Amal, 2010a: 35). Pembagian atas dua wilayah kekuasaan ini sangat boleh jadi memiliki hubungan dengan perbedaan penutur bahasa di pulau tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa hingga saat ini, di Pulau Makian dikenal dua bahasa yaitu bahasa Makian Dalam dan Bahasa Makian

Luar. Bahasa Makian Dalam dikenal oleh masyarakat yang bermukim di sisi timur pulau dan Bahasa Makian Luar dikenal oleh masyarakat yang bermukim di sisi barat pulau. Dalam aspek lain, pada periode pra-kolonial, Pulau Makian dan Pulau Motir (Moti) juga dikenal sebagai salah satu sumber utama produksi cengkih di Maluku selain Ternate dan Tidore. Pulau Makian bahkan dikenal sebagai penghasil jenis Cengkih Raja yaitu jenis cengkih terbaik dibanding dengan cengkih produksi dari daerah lain di Maluku Utara. Dengan demikian, periode sebelum kehadiran bangsa Eropa di Maluku Utara wilayah ini telah berperan dalam aspek politik dan perdagangan.

Kondisi politik dan perdagangan secara umum di wilayah Maluku Utara pada periode kehadiran bangsa Eropa sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan kondisi sebelumnya. Hal ini karena, kehadiran Portugis dan Spanyol selain dalam rangka perdagangan rempah-rempah juga menegaskan persaingan politik antara kedua kekuatan lokal. Sebagaimana diketahui bahwa Portugis merupakan sekutu politik dan militer bagi Ternate dan Spanyol sebagai sekutu politik dan militer bagi Tidore. Demikian halnya kondisi politik lokal di Pulau Makian dimana daerah ini dianggap sebagai sumber utama produksi cengkih sehingga daerah ini pun diperebutkan oleh kedua bangsa Iberia tersebut.

Demikian, berdasarkan latar historisnya dapat disebutkan bahwa Makian memiliki peran penting dalam konteks perdagangan cengkih masa Portugis-Spanyol di wilayah

Maluku (utara). Peran ini terutama berkaitan dengan wilayah Makian sebagai salah satu sumber utama produksi cengkih, bahkan merupakan penghasil jenis cengkih terbaik. Peran ini juga berkaitan dengan perseteruan politik antara pihak Ternate dan Tidore, dimana Makian dianggap sebagai daerah netral karena keduanya memiliki pengaruh yang sama di Pulau Makian. Sementara itu, dapat disebut pula bahwa Makian merupakan wilayah *peripheral* dimana Ternate dan Tidore merupakan wilayah pusat baik dalam konteks jaringan kekuasaan maupun dalam konteks jaringan perdagangan (tata niaga).

Pada periode akhir kehadiran Portugis dan Spanyol di Maluku Utara, dinamika politik di wilayah ini semakin meningkat. Selain karena perseteruan antara dua pihak Portugis-Ternate dan Spanyol-Tidore, hubungan antara Portugis dan Ternate semakin memanas pasca terbunuhnya Sultan Khairun pada tahun 1570. Peristiwa ini bahkan menyebabkan Portugis dipaksa meninggalkan wilayah Maluku Utara pada tahun 1575 dan akhirnya memilih Ambon sebagai pusat aktivitas baru (Amal, 2010a: 204 dan 209). Praktis, setelah hengkangnya Portugis, Spanyol lebih banyak berperan dalam dinamika politik dan perdagangan di wilayah ini. Salah satu tindakan yang dianggap penting oleh Spanyol adalah melakukan serangan terhadap wilayah-wilayah lain di Maluku Utara termasuk Bacan, Jailolo, dan Makian bahkan juga Ternate. Penyebab lain adalah hadirnya kekuatan baru yaitu Belanda dalam persaingan perdagangan pada akhir abad ke-16 di wilayah ini. Kehadiran Belanda di Maluku Utara sekaligus dimanfaatkan oleh Ternate untuk mengusir Spanyol yang berhasil menaklukkan Ternate pada tahun 1606.

Kehadiran Belanda di Ternate ditandai dengan pembangunan sebuah benteng pada tahun 1607. Peristiwa ini sekaligus menandai kehadiran otoritas baru menggantikan Portugis di Ternate (secara umum di Kepulauan Maluku). Setelah mengikat perjanjian kerjasama dengan Ternate, pasukan Belanda-Ternate mulai melakukan perluasan wilayah kekuasaan di Maluku Utara – bagi pihak Ternate merupakan

upaya mengembalikan wilayah kekuasaan mereka yang sebelumnya telah direbut oleh Spanyol-Tidore. Hal pertama yang dilakukan oleh Belanda adalah melakukan serangan terhadap wilayah di luar Ternate, diantaranya Bacan, Makian, Jailolo, dan juga Tidore (Mareku). Tindakan ini sekaligus upaya membangun sistem perbentengan di beberapa pulau di bagian selatan Ternate, yaitu; Benteng Nassau di Pulau Moti pada tahun 1609, Benteng Mauritius dan Wailoa (Tabelola) di Pulau Makian pada tahun 1612, Benteng Tafasoho di Pulau Makian pada tahun 1613, dan Benteng (Pos Pemantau) Puwati di Pulau Makian pada tahun 1634. Jika merunut kronologi pembangun benteng di wilayah ini tampak jelas bahwa pembangunan sistem perbentengan ini bertujuan untuk mengepung posisi Spanyol yang berpusat di Tidore (Soa Sio) saat itu.

Pulau Makian sendiri berhasil direbut oleh Pasukan Belanda-Ternate pada tahun 1608. Benteng yang sebelumnya dikuasai oleh Spanyol yaitu Benteng Tafasoho diambil alih oleh Belanda kemudian diperluas dan diperkuat dengan empat bastion pada tahun 1613. Demikian halnya dengan benteng yang ditinggalkan Portugis yaitu Tabulolo (Wailoa) juga diambil alih oleh Belanda pada tahun 1612. Tampaknya, baik Portugis, Spanyol maupun Belanda menganggap bahwa Pulau Makian memiliki posisi yang strategis sehingga ketiganya menganggap penting untuk menempatkan perwakilan mereka atas pulau ini. Posisi strategis ini, selain Pulau Makian sebagai sumber utama cengkih pada saat itu, keletakan geografis pulau ini juga menjadi aspek utama yang menjadi perhatian karena lokasinya yang dekat dengan Pulau Ternate dan Pulau Tidore yang menjadi pusat kekuasaan saat itu. Pulau ini juga sekaligus menjadi penghubung kedua pulau yang terletak di utara dan beberapa pulau lain yang terletak di bagian selatan.

Jika merunut pada beberapa peristiwa penting di Pulau Makian setelah kehadiran bangsa Eropa di Maluku Utara diperoleh beberapa asumsi bahwa baik Portugis maupun

Spanyol memiliki otoritas atas Pulau Makian. Hal ini melanjutkan situasi sebelum kehadiran bangsa Eropa bahwa Pulau Makian menjadi wilayah yang diperebutkan oleh Ternate dan Tidore. Daerah yang menjadi bagian dari otoritas Tidore (dan juga Spanyol) kemungkinan adalah daerah Tafasoho, sementara daerah otoritas Ternate (dan juga Portugis) adalah daerah Tabulolo (Wailoa). Hal ini mengacu pada interpretasi atas catatan historis yang dibuat oleh Belanda terkait dengan Benteng Tafasoho yang disebut merupakan benteng Spanyol yang diambil alih dan diperluas oleh Belanda pada tahun 1613. Demikian pula keterangan yang memuat tentang Benteng Tabulolo (Wailoa) yang sebelum direbut oleh Belanda merupakan benteng dan juga permukiman orang-orang Portugis. Sementara itu, Ngofakiaha yang merupakan daerah utama di Pulau Makian kemungkinan merupakan bagian dari Ternate mengingat kedekatan kultural masyarakat Ngofakiaha dengan pihak Kesultanan Ternate. Dan setelah kehadiran Belanda, praktis daerah-daerah kekuasaan Ternate menjadi bagian dari kekuasaan Belanda. Akhirnya pada tahun 1663, Belanda berhasil memaksa pihak Spanyol untuk meninggalkan Maluku Utara.

Setelah merebut Pulau Makian, pihak Belanda pada masa Gubernur Jacques Le Febure menjabat tahun 1625-1629, membangun sebuah kantor sekaligus berfungsi sebagai gudang yang diberi nama *Zeeburgh* di Ngofakiaha. Kebijakan ini ditempuh untuk menghadapi persaingan perdagangan dengan pihak Spanyol. Sebuah catatan penting menyebutkan bahwa pada tahun 1627, pihak Ternate-Belanda tiba di Pulau Makian dan memaksakan pelarangan penjualan cengkih kepada pihak lain kecuali kepada Belanda. Peristiwa inilah yang kemudian menjadi awal dari upaya Belanda untuk menguasai produksi cengkih di Pulau Makian. Atas dasar inipula Belanda kemudian memilih Ngofakiaha sebagai pusat perdagangan cengkih di Pulau Makian dengan mendirikan sebuah bangunan (selain sebuah benteng yang

telah ada sebelumnya) untuk mendukung upaya monopoli cengkih mereka.

Kondisi ini tampaknya tidak berlangsung lama karena pada tahun 1652, pihak Belanda menempuh kebijakan baru untuk memusatkan produksi cengkih di wilayah lain yaitu Kepulauan Lease yang dianggap lebih mudah diawasi. Guna mendukung hal tersebut, Belanda menempuh dua kebijakan yaitu; *Pertama*, mengadakan sebuah perjanjian dengan pihak Kesultanan Ternate tentang pelarangan produksi cengkih selain di wilayah yang telah ditetapkan oleh Belanda. Pemerintah Belanda juga akan memberikan kompensasi sebagai pengganti keuntungan yang akan diperoleh setiap tahunnya oleh Kesultanan Ternate dari perdagangan cengkih. *Kedua*, dalam periode tersebut Belanda telah membangun sistem perbentengan untuk memudahkan pengawasan jaringan perdagangan cengkih mereka di wilayah Kepulauan Lease (Mansyur, 2013: 57; Mansyur, 2014: 97). Hal ini tentu berakibat pada menurunnya peran wilayah-wilayah lain di Maluku Utara khususnya Pulau Makian sebagai pusat produksi cengkih.

KESIMPULAN

Berdasarkan pola sebaran benteng yang ada di wilayah Pulau Makian dan Pulau Moti memberi gambaran tentang periode kolonial di luar wilayah pusat-pusat kekuasaan (Ternate dan Tidore) di Maluku Utara. Berbeda dengan jejak kehadiran Portugis dan Spanyol, jejak pengaruh kehadiran Belanda di Pulau Makian dan Pulau Moti masih dapat diamati. Jejak kehadiran kolonial, baik Portugis-Spanyol maupun Belanda di wilayah ini dapat menjelaskan aspek kronologi serta peran wilayah dan hubungan antar wilayah dalam kaitannya dengan perdagangan rempah-rempah masa lampau.

Informasi yang menjelaskan kronologi situs didasarkan pada penelusuran sumber-sumber historis yang ada yang menyebutkan bahwa kronologi situs perbentengan yang ada di Pulau Makian dan Moti diawali oleh kehadiran Portugis dan Spanyol di Maluku

Utara sekitar abad ke-16 hingga awal abad ke-17. Oleh karena Belanda membangun kembali kedua benteng ini, maka bukti-bukti kehadiran Portugis dan Spanyol tidak dapat diidentifikasi lagi. Kehadiran Belanda melalui badan usahanya yaitu VOC, kemudian menggantikan kedudukan Portugis dan Spanyol di kedua pulau tersebut. Sementara itu, gambaran tentang peran wilayah dan hubungan antar wilayah merupakan penjelasan terhadap aspek sinkronik dan diakronik wilayah penelitian.

Dengan demikian, dapat disimpulkan tentang faktor-faktor utama yang menjelaskan terbentuknya jaringan perbentengan di wilayah Pulau Makian dan Pulau Moti. *Pertama*, faktor utama terbentuknya jaringan perbentengan ini adalah faktor geografis dimana wilayah ini merupakan daerah kepulauan. Kondisi ini mengharuskan bangsa Kolonial (baik Portugis-Spanyol maupun Belanda) untuk mendirikan benteng di setiap pulau di wilayah ini. *Kedua*, kondisi keamanan dimana dalam periode perdagangan cengkih di Maluku terjadi persaingan tidak hanya diantara pihak penguasa lokal, tetapi juga diantara sesama bangsa Eropa. *Ketiga*, terbentuknya jaringan perbentengan ini bertujuan untuk mendukung sistem tata niaga cengkih di wilayah ini. Titik-titik lokasi keberadaan benteng dibangun dekat dengan sumber-sumber produksi cengkih baik di Pulau Moti maupun di Pulau Makian, sehingga benteng-benteng tersebut sekaligus berfungsi sebagai pusat-pusat pengumpul komoditi cengkih yang diproduksi di daerah sekitar. *Keempat*, pendirian benteng di daerah-daerah produksi cengkih sekaligus dimaksudkan sebagai pos pengawasan terhadap wilayah sekitarnya. Pengawasan terhadap wilayah-wilayah ini penting dilakukan oleh pihak kolonial untuk mempertahankan eksistensi kekuasaan mereka. Dalam hal ini, benteng yang ditempatkan di setiap titik pulau di Maluku berfungsi sebagai pos pengawasan yaitu pengawasan terhadap kondisi keamanan, pengawasan terhadap tata niaga cengkih, serta pengawasan terhadap masyarakat setempat.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih penulis ucapkan kepada Balai Arkeologi Ambon atas pendanaan proyek penelitian ini, yaitu; “Survey Arkeologi Kolonial di Wilayah Pulau Makian dan Pulau Moti” pada tahun 2014.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Novida. (2001). *Dutch Forts of Java A Locational Study*. Thesis. Singapore: National University of Singapore.
- Abdurachman, Paramita R. (2008). *Bunga Angin Portugis di Nusantara, Jejak-Jejak Kebudayaan Portugis di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan Yayasan Obor Indonesia.
- Amal, Adnan M. (2010)a, *Portugis dan Spanyol di Maluku*. Jakarta. Komunitas Bambu.
- Amal, Adnan M. (2010)b, *Kepulauan Rempah-rempah Perjalanan Sejarah Maluku Utara 1250-1950*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Andaya, L.Y. (1993). *The World of Maluku: Eastern Indonesia in the Early Modern Period*. Honolulu: University of Hawaii Press.
- Gill, Robert G. (1995). *De Indische Stad op Java en Madoera*. Dissertation. Universitas Delft.
- Harkantiningsih, Naniek. (2014). Pengaruh Kolonial di Nusantara. *Kalpataru Majalah Arkeologi*, 23(1), 67-80.
- Lape, Peter V. (2000). *Contact and Conflict in the Banda Island, Eastern Indonesia 11th – 17th*. Dissertation. Department of Anthropology at Brown University.
- Mansyur, Syahrudin. (2011). Jejak Tata Niaga Rempah-Rempah dalam jaringan Perdagangan Masa Kolonial di Maluku. *Kapata Arkeologi*, 7(13), 20-39.
- Mansyur, Syahrudin. (2013). Perdagangan Cengkih Masa Kolonial dan Jejak Pengaruhnya di Kepulauan Lease. *Kalpataru Majalah Arkeologi*, 22(1), 43-59.

- Mansyur, Syahrudin. (2014). Sistem Perbentengan dalam Jaringan Niaga Cengkih Masa Kolonial di Maluku. *Kapata Arkeologi*, 10(2), 85-98.
- Marihandono, Joko. (2008). Perubahan Peran dan Fungsi Benteng dalam Tata Ruang Kota. *Wacana: Jurnal Ilmu Pengetahuan Budaya*, 10(1).
- Pusat Dokumentasi Arsitektur. (2010). *Inventory and Identification Forts in Indonesia*. Jakarta: Pusat Dokumentasi Arsitektur; Direktorat Peninggalan Purbakala Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata; PAC Architects and Consultants.
- Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional. (2008). *Metode Penelitian Arkeologi*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional, Badan Pengembangan Sumberdaya Kebudayaan dan Pariwisata, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata.
- Ricklefs. M.C. (2010). *Sejarah Indonesia Modern: 1200-2008*, Cetakan III November 2010. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- Roever, A.de. et.al. 2008. *Grote Atlas van de Verenigde Oost-Indische Compagnie deel 3: Indisvhe Archipel en Oceanie*. Zierikzee: Asia Maior
- Tanudirdjo, D.A. (2013). Interaksi Regional dan Cikal Bakal Perdagangan Internasional di Maluku. *Kalpataru Majalah Arkeologi*, 22(1), 1-60.
- Tibbetts, G.R. 1979. *A Study of the Arabic Texts Containing Material on South-East Asia*. Leiden: E.J. Brill for the Royal Asiatic Society.
- Tim Penelitian. (2006). Jaringan Perdagangan Masa Kesultanan Ternate-Tidore-Jailolo di Wilayah Maluku Utara Abad ke-16 hingga Abad ke-19. Tahap I. *Laporan Penelitian Arkeologi*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional. Tidak terbit.
- Wall, Victor Ido van de. (1928). *de Nederlandsche Oudheden in de Molukken*. Gravenhage: Martinus Hijhoff.